

JENDELA

Pendidikan dan Kebudayaan

1 / Februari - 2016



70% Anggaran untuk Program Rakyat

APBN 2016: Rp 49T untuk
Kemendikbud dari Rp 419T Anggaran
Pendidikan

Hal: 03

Ini Program Prioritas
Kemendikbud Selama 2016

Hal: 14

Mengenal Warisan Budaya Takbenda
Indonesia

Hal: 24

DAFTAR ISI

Sapa
Redaksi

Hal: 03

Dari
Mas Menteri

Hal: 04

APBN 2016 :
Rp 49 Triliun untuk Kemendikbud

Hal: 06



70%
Anggaran
Kemendikbud
untuk
Program
Rakyat

Hal: 08



Ini Program Prioritas
Kemendikbud Selama 2016

Hal: 14



Resensi Buku
*Mosaic of
Indonesian Batik*

Hal: 28



Mengenal Warisan Budaya
Takbenda Indonesia

Hal: 24

Senarai
Kata
Serapan

Hal: 34

Sapa Redaksi

Tahun 2016 menjadi tahun yang istimewa karena menjadi tahun perdana lahirnya majalah "Jendela Pendidikan dan Kebudayaan". Majalah ini hadir sebagai bagian dari keterbukaan informasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Informasi yang disajikan diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap berbagai kebijakan dan program yang dilakukan selama satu tahun di Kemendikbud. Majalah ini akan hadir dalam 12 edisi selama 2016 ini.



Majalah sebenarnya bukan hal baru bagi Kemendikbud. Sebelumnya Kemendikbud memiliki sebuah terbitan dwi bulanan. Namun, konsep yang tahun ini diusung oleh majalah "Jendela Pendidikan dan Kebudayaan" diharapkan menjadi sumber informasi dan data resmi Kemendikbud yang dapat dikutip maupun diambil manfaatnya oleh berbagai pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Di edisi perdana ini, "Jendela Pendidikan dan Kebudayaan" mengetengahkan fokus utama mengenai anggaran fungsi pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Kemendikbud mendapat alokasi

anggaran sebesar Rp 49,2 triliun yang digunakan untuk membiayai program-program yang langsung menyentuh pelaku pendidikan dan kebudayaan.

Di dalamnya kami sajikan secara komprehensif alokasi anggaran yang dibagi pada masing-masing unit utama Kemendikbud, termasuk program-program prioritas yang dikerjakan selama 2016. Pada beberapa unit utama Kemendikbud bahkan mencantumkan target sasaran program-program tersebut. Seluruhnya ditujukan bagi kemajuan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia.

Tidak itu saja, di edisi perdana ini, kami juga menyuguhkan artikel ringan namun menarik tentang kebudayaan dan hasil penelitian tentang penumbuhan budaya baca. Artikel-artikel tersebut diharapkan menambah wawasan pembaca terhadap apa yang terjadi di dunia pendidikan dan kebudayaan.

Kami juga menghadirkan resensi buku yang merupakan salah satu koleksi Perpustakaan Kemendikbud. Harapannya, informasi resensi buku ini bisa memberikan gambaran tentang buku yang dapat dipinjam oleh anggota Perpustakaan Kemendikbud.

Selamat membaca. Salam.

Redaksi

REDAKSI

Pelindung:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan

Penasih: Sekretaris Jenderal, Didik Suhardi

Pengarah Kreatif: Abdul Rahman Ma'mun, Ahmad Aditya, Adi Cahyadi

Penanggung Jawab: Asianto Sinambela

Pemimpin Redaksi: Eka Nugrahini





Redaktur Pelaksana: Emi Salpiati

Staf Redaksi: Ratih Anbarini, Aline Rogeleonick, Desliana Maulipaksi, Agi Bahari, Gloria Gracia, Seno Hartono

Fotografi, Desain & Artistik: BKLM

Sekretariat Redaksi:

Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM),
Kemendikbud, Gedung C Lantai 4,
Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta,
Telp. 021-5711144 Pes. 2413

-  kemdikbud.go.id
-  [Kemdikbud.RI](https://www.facebook.com/kemdikbud.ri)
-  [@kemdikbud_RI](https://twitter.com/kemdikbud_RI)
-  [KEMENDIKBUD RI](https://www.youtube.com/KEMENDIKBUD_RI)



DARI MAS MENTERI

“ Pada tahun ini kita tetap berkomitmen untuk tetap mengalokasikan 70% anggaran untuk program atau gerakan rakyat, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), beasiswa, dan tunjangan guru. Ini mutlak, tak bisa diganggu gugat. ”

04

Mengawali kinerja pada awal tahun 2016 ini kita patut bersyukur. Alhamdulillah, kita melewati tahun 2015 dengan deretan capaian yang bisa kita selesaikan dengan baik. Tantangan akan selalu ada, bisa besar dan bisa juga kecil. Tapi, yang penting, perasaan dan sikap mental kita sendiri yang akan membuat tantangan itu terasa jadi terasa berat atau terasa ringan. Mari kita pilih untuk melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk membuat kemajuan.

Soal apresiasi dari luar, itu mesti kita anggap sebagai bonus. Itu bukan tujuan utama kita. Yang utama adalah kita tetap bekerja untuk membuat perubahan positif bagi masyarakat. Kelak, ketika perubahan itu telah terjadi, kita bisa dengan bangga bilang kepada anak-anak kita bahwa kita berada di garis depan dalam melakukan perubahan itu.

Di lingkungan dalam sendiri kita telah memaksimalkan kinerja kita dengan memperoleh peringkat ke-2 dari 10 kementerian dan lembaga dengan anggaran terbesar. Penyerapan anggaran kita mencapai 94,30%. Tentu, ini prestasi kita bersama. Padahal, kita terus melakukan restrukturisasi kelembagaan. Harap saya sederhana saja, tahun ini kita bisa melampaui capaian kinerja tahun lalu.

Sungguh, kita merasa terhormat mengurus pendidikan dan kebudayaan. Konstitusi mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN. Dari anggaran Rp 2.095,7 triliun APBN 2016, sebanyak Rp 419,2 triliun diberikan untuk pendidikan. Angka ini dipecah menjadi Rp 146,29 triliun untuk kementerian/lembaga, dan untuk transfer daerah dan dana desa senilai Rp 267,89 triliun. Kemendikbud sendiri mengelola Rp 49,23 triliun.

Pada tahun ini kita tetap berkomitmen untuk tetap mengalokasikan 70% anggaran untuk program atau gerakan pro rakyat, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), beasiswa, dan tunjangan guru. Ini mutlak, tak bisa diganggu gugat. Mereka wajib kita utamakan. Tak boleh ada hak mereka yang tergantung di kita.

Tentu, dalam soal anggaran ini kita tak hanya bicara angka. Kita juga mesti mengedepankan kualitas. Kita mesti bekerja dengan semangat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Karena itu, jika kita menggelar sebuah acara, misalnya, maka yang mesti kita utamakan adalah pelaku pendidikan dan kebudayaan.

Dalam konteks anggaran, saya harap ada pembaharuan. Jika pada tahun-tahun sebelumnya penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tingkat nasional selalu berputar di kota-kota besar yang ditopang ketersediaan penginapan, maka tahun ini saya meminta pendekatan baru, yaitu tinggal langsung bersama warga. Ini gerakan konkret melibatkan publik dalam soal anggaran.

Bayangkan bila kita mengadakan lomba Olimpiade Sains Nasional, misalnya. Jika kita menyelenggarakannya hanya di kota atau kabupaten yang memiliki penginapan, tentu tempatnya tak bakal banyak berubah. Ya di situ-situ saja. Namun, coba bayangkan bila OSN diselenggarakan di satu kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Penginapan di tempat itu tentu ada, tapi pasti terbatas. Sebagai jalan alternatifnya adalah menginap di rumah warga. Dari situ hubungan silaturahmi akan terjalin.

Anak-anak peserta OSN itu akan berinteraksi dengan anak-anak di satu kecamatan itu. Para orang tuanya pun akan saling berkenalan. Semua warga tentu antusias melihat dan menonton acara itu. Mereka, secara tidak langsung, akan merasa memiliki acara itu. Saya yakin, mereka akan berbondong-bondong turut menyukseskan OSN. Yang juga penting adalah, dengan adanya OSN anak-anak di kampung itu akan menyaksikan secara langsung bagaimana teman-teman sebaya mereka bertanding dalam laga tingkat nasional itu.

Selain akan membangkitkan inspirasi, konsep acara seperti itu juga akan menghidupkan ekonomi daerah tersebut. Ini salah satu bayangan saya tentang salah satu bentuk pelibatan publik dalam soal anggaran. Tentu masih berderet langkah pembaruan lain dalam soal anggaran pada tahun ini. Saya yakin, kita mampu dan bisa melampaui capaian dan target tahun ini.

Bercita-cita itu baik. Namun, menjalani dan melampaui cita-cita itu lebih baik. Karena itu, mari bersama-sama kita lampau apa yang sudah kita rencanakan tahun ini. Selamat bekerja.

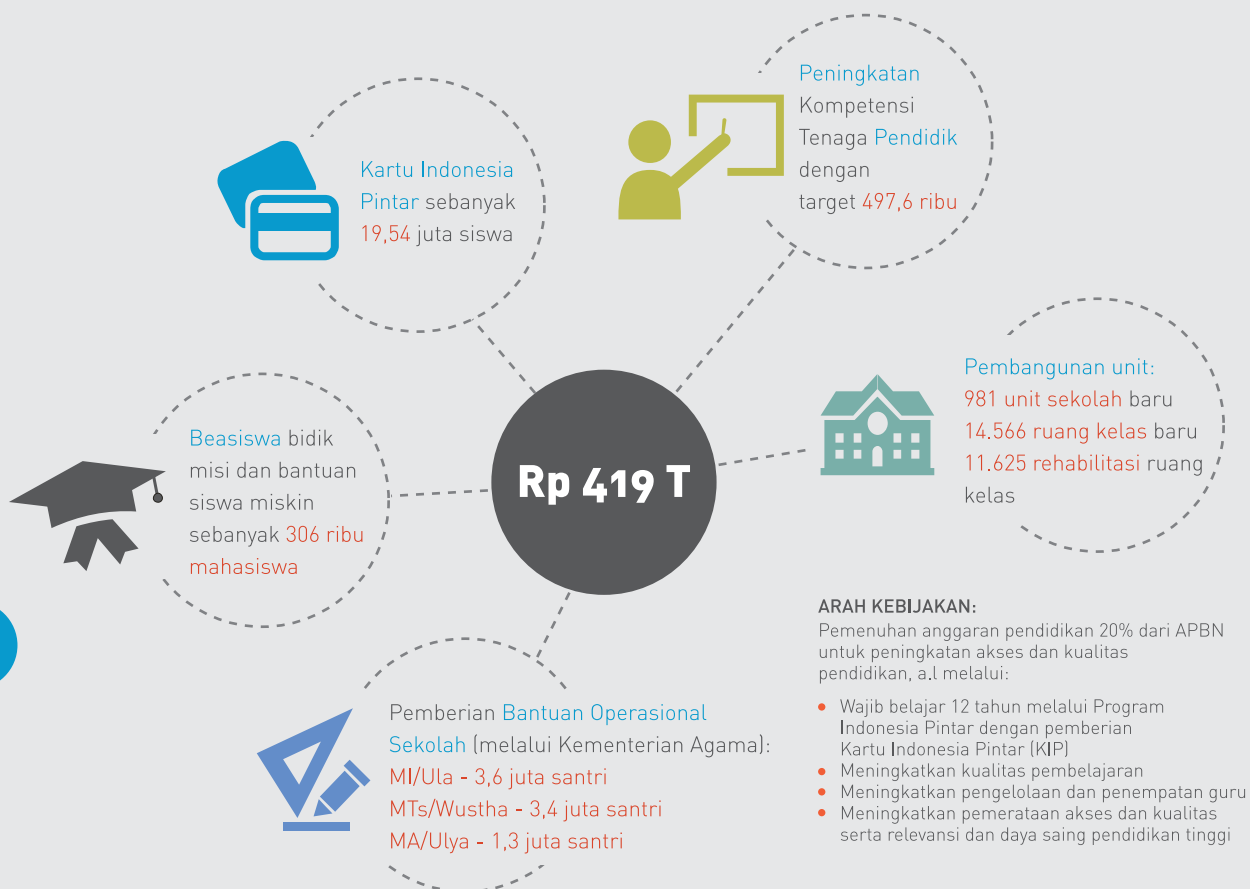
Salam hangat,

Anies Baswedan



APBN 2016 :

Rp 419 Triliun Anggaran Pendidikan, Rp 49,2 Triliun untuk Kemendikbud

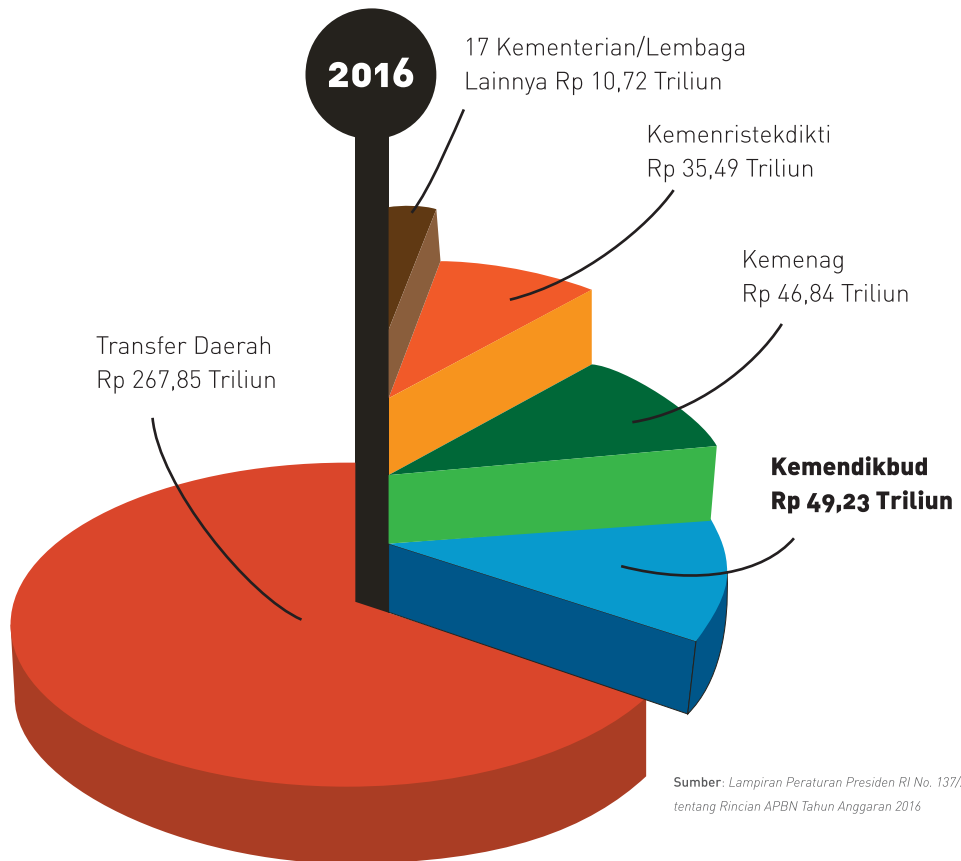


Sumber: Buku Informasi APBN 2016
Kementerian Keuangan

Anggaran pendidikan yang dialokasikan tahun ini senilai Rp 419 triliun. Anggaran tersebut diambil dari alokasi 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Dari anggaran fungsi pendidikan itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerima Rp 49,2 triliun atau 2,3 persen dari total APBN 2016. Sebagian besar anggaran fungsi pendidikan itu atau senilai Rp 267,9 triliun ditransfer ke daerah. Anggaran fungsi pendidikan tidak semata-mata dikelola oleh Kemendikbud, tetapi dialokasikan juga oleh kementerian/lembaga yang mengelola bidang pendidikan di bawahnya, serta ditransfer langsung ke daerah.

Sektor pendidikan tetap menjadi bagian yang diprioritaskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Buktinya sektor ini tetap mendapat alokasi anggaran 20 persen dari APBN. Bahkan kementerian yang secara spesifik mengelola bidang pendidikan masuk dalam 10 kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar. Sebut saja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), serta Kementerian Agama (Kemenag).

Berdasarkan buku "Informasi APBN 2016" yang diterbitkan Kementerian Keuangan disebutkan, pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen APBN tetap dilakukan untuk upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan.



Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, anggaran pendidikan tahun ini termasuk yang tertinggi. Tak heran jika Menteri Keuangan, Bambang Brojonegoro menyebut anggaran pendidikan dalam APBN 2016 mencetak sejarah. Anggaran ini dibagi dalam dua alokasi besar, yaitu anggaran pendidikan pada kementerian/lembaga sebesar Rp 146,29 triliun dan anggaran pendidikan melalui transfer daerah dan dana desa senilai Rp 267,89 triliun. Sementara sisanya sebesar Rp 5 triliun merupakan dana pengembangan pendidikan nasional atau yang lebih dikenal dengan dana abadi.

Tiga kementerian teratas yang mendapat alokasi anggaran tertinggi untuk bidang pendidikan ini adalah Kemendikbud sebesar Rp 49,23 triliun; Kemenristek dikti Rp 39,49 triliun; dan Kemenag Rp 46,84 triliun. Sementara sisanya sebesar Rp 10,72 triliun tersebar di 17 kementerian /lembaga lainnya.

Memang jika dibandingkan tahun sebelumnya, anggaran tahun ini yang diterima di ketiga kementerian

“Pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen pada APBN 2016 tetap dilakukan untuk upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan.”

tersebut turun. SekretarisJenderal Kemendikbud, Didik Suhardi mengatakan, penurunan anggaran tersebut disebabkan beberapa faktor. Antara lain fungsi pendidikan tidak hanya berada di pusat, namun juga diaplikasikan pada daerah masing-masing, sehingga pagu anggaran dimasukkan dalam anggaran transfer daerah. Misalnya untuk anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang langsung didekonsentrasikan Kementerian Keuangan keprovinsi melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). **(Ratih)**

70% Anggaran Kemendikbud untuk Program Rakyat

Menerima jatah anggaran fungsi pendidikan dan kebudayaan tertinggi dibanding kementerian lainnya yang membawahi bidang pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan tetap memfokuskan diri pada tiga strategi utama. Ketiga strategi itu adalah (1) Penguatan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan; (2) Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan dan Kebudayaan; serta (3) Efektivitas Birokrasi melalui Perbaikan Tata Kelola dan Pelibatan Publik. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan menegaskan sebanyak 70 persen dari anggaran yang diterima kementerianya diperuntukkan untuk sepenuhnya membiayai program-program rakyat.





Program-program rakyat yang dimaksud misalnya beasiswa, tunjangan profesi guru, rehabilitasi sekolah, layanan bidang kebudayaan dan bahasa, bantuan pendidikan, serta sarana dan prasarana. Seluruh program itu akan dipastikan digunakan sebaik-baiknya untuk para pelaku pendidikan dan kebudayaan. Mendikbud, Anies Baswedan memastikan kepada seluruh jajarannya agar komitmen melaksanakan program-program rakyat itu terus dijaga.

Anggaran fungsi pendidikan di Kemendikbud sebesar Rp 49,23 triliun dialokasikan untuk untuk belanja mengikat sebesar Rp 28,62 triliun dan belanja tidak mengikat atau kegiatan-kegiatan lainnya sebesar Rp 13,75 triliun. Anggaran mengikat Kemendikbud, misalnya, Kartu Indonesia Pintar (KIP), gaji dan operasional, tunjangan guru, ujian nasional (UN) dan akreditasi, beasiswa prestasi, sertifikasi, peningkatan mutu PTK, dan lainnya.

Sementara anggaran belanja tidak mengikat dalam kegiatan meliputi sarana prasarana wajib belajar 12 tahun, perencanaan pelaksanaan kurikulum di sekolah, penelitian, budaya dan bahasa, kursus dan pelatihan, pendidikan masyarakat, kompetisi dan lomba.

Anggaran belanja tidak mengikat juga dialokasikan untuk beasiswa guru, uji



Foto: Dok. BKLM

kompetensi guru, guru berkualifikasi S1/D4, PAUDISASI, beasiswa darmasiswa, pengembangan profesi tenaga didik, hingga sistem informasi pendidikan. Mendikbud mengungkapkan, tahun ini pihaknya menginginkan kinerja kementeriannya lebih ditingkatkan. Peningkatan ini tidak hanya sekadar serapan anggaran, tetapi juga kualitasnya. "Kita juga berkomitmen akuntabilitas dan kinerja kementerian akan lebih baik dibanding tahun sebelumnya," tuturnya.

la optimis hal tersebut dapat tercapai, mengingat pada 2015 yang lalu, meskipun terjadi restrukturisasi

organisasi, realisasi serapan anggaran Kemendikbud mencapai 93,39 persen atau berada di peringkat kedua di antara 10 kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar. "Seluruh jajaran Kemendikbud akan berupaya semaksimal mungkin merealisasikan program kerjanya sesegera mungkin, khususnya yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," imbu Mendikbud.

Berdasarkan keputusan dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI pada Oktober 2015 silam disepakati alokasi anggaran untuk delapan unit utama yang ada di Kemendikbud. Anggaran

Alokasi Anggaran Kemendikbud 2016 per unit utama

Unit Utama	Program	Pagu Alokasi Anggaran APBN 2016
1. SEKRETARIAT JENDERAL	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	2.902.381.429.000
2. INSPEKTORAT JENDERAL	Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur	195.941.727.000
3. DITJEN DIKASMEN	Pendidikan dasar dan menengah	27.505.148.662.000
4. DITJEN PAUD & DIKMAS	Pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat	2.248.879.612.000
5. BALITBANG	Penelitian dan pengembangan	1.424.077.809.000
6. BADAN BAHASA	Pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra	499.170.918.000
7. DITJEN KEBUDAYAAN	Pelestarian budaya	1.885.553.886.000
8. DITJEN GURU & TENAGA KEPENDIDIKAN	Guru dan tenaga kependidikan	12.571.645.431.000
TOTAL		49.232.799.474.000

terbesar ada pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Rp 27,5 triliun. Diikuti Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp 12,6 triliun. Kemudian, Sekretariat Jenderal dengan pagu alokasi anggaran sebesar Rp 2,9 triliun, diikuti Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dengan Rp 2,25 triliun.

Selanjutnya Direktorat Kebudayaan melalui program pelestarian budaya mendapat pagu alokasi anggaran sebesar Rp 1,88 triliun. Badan

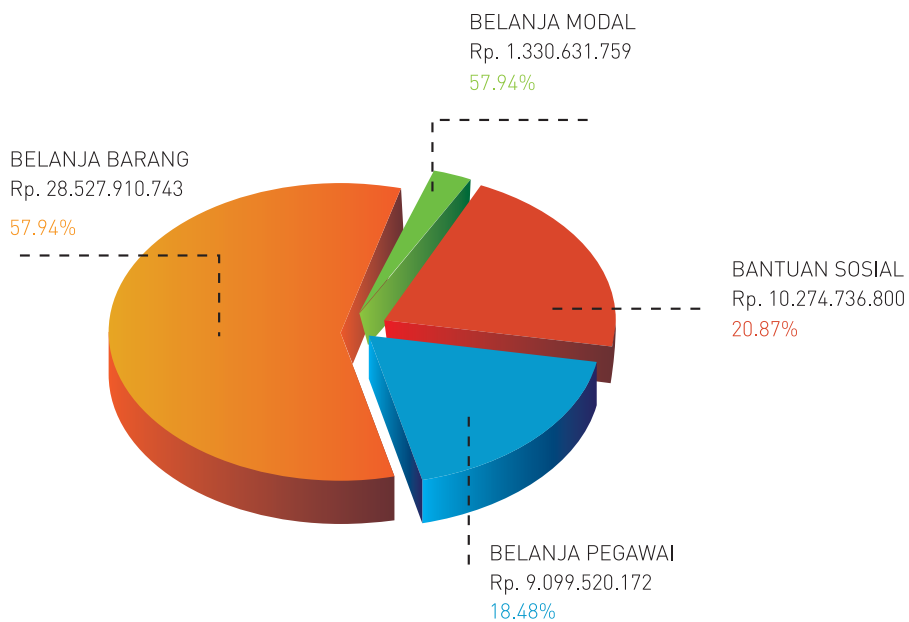
Bahasa menerima Rp 499 miliar dengan program pengembangan dan pembinaan Bahasa dan sastra. Sementara itu, Inspektorat Jenderal lewat program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur mendapat Rp 195 miliar.

Mendikbud menambahkan, anggaran pemerintah selain untuk menjalankan program-program yang telah ditetapkan, juga menjadi stimulus mencapai pembangunan nasional dan target pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu anggaran pemerintah memiliki daya

dorong yang besar terhadap perekonomian Indonesia. "Dalam hitungan ekonom, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi akan bisa menyerap 200 ribu lapangan kerja baru. Jika kita bisa menggerakkan lebih awal, menjalankan program-program kita lebih cepat, dampaknya lebih daripada statistik yang kita miliki secara internal, tapi berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat," jelasnya. **(Ratih)**



Pagu Kemendikbud Per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2016



■ BANTUAN PEMERINTAH

1. Pembangunan USB/RKB;
2. Rehab sekolah/Ruang Kelas
3. Bantuan lembaga penyelenggaran pendidikan dan kebudayaan;
4. Beasiswa unggulan
5. Beasiswa Darmasiswa RI;
6. Layanan sekolah di luar negeri

- 1. Program Indonesia Pintar/ Beasiswa Miskin;
2. Penyelenggaraan PAUD di Daerah Tanggap Darurat & Pasca Bencana
3. PTK pasca bencana yang mendapatkan bantuan
4. Layanan Daerah Bencana Alam/Sosial

- 1. Tunjangan profesi/Fungsional/Khusus/ Guru Bantu dan SILN (77,46%);
2. Gaji dan Tunjangan Pegawai (22,54%)

Ini Program Prioritas Kemendikbud Selama 2016

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membagi anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp 49,23 triliun ke dalam delapan unit utama. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) menjadi unit utama yang terbesar menerima pagu alokasi anggaran. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan menginstruksikan kepada seluruh jajarannya agar segera menjalankan program-program yang telah ditetapkan sesegera mungkin.



Foto: Dok. BKLM

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan prioritas utama pada dua komponen, yaitu pelaku dan ekosistem pendidikan dan kebudayaan. Hal ini dijalankan lewat tiga

strategi, yaitu (1) penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan; (2) peningkatan mutu dan akses; serta (3) peningkatan efektivitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik.

Maka, program kerja yang disusun oleh delapan unit utama yang berada di bawah Kemendikbud juga mengacu pada tiga strategi itu. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD



dan Dikmas), misalnya, pada strategi penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan, unit utama ini menargetkan lebih dari 85 ribu orang ditingkatkan kapasitasnya dalam menerapkan pendidikan keluarga. Sementara itu untuk strategi kedua, Ditjen PAUD dan Dikmas menargetkan sebanyak 4 ribu lembaga PAUD diberikan bantuan dengan total anggaran senilai Rp 126,9 miliar.

Di Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), ada empat program prioritas yang dijalankan selama 2016 ini. Program tersebut adalah Program Indonesia Pintar (PIP), Sekolah Garis Depan, Penumbuhan Budi Pekerti, dan pengembangan kurikulum nasional. Direktorat ini menargetkan sebanyak lebih dari 17 juta siswa menerima manfaat dari PIP dan sebanyak 225 sekolah yang berada di garis depan ditingkatkan kualitas pendidikannya.

Sementara itu untuk Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), terdapat sembilan program prioritas yang akan dilaksanakan pada 2016 ini, di antaranya menguji kompetensi sekitar 3 juta GTK, memberi pelatihan peningkatan kompetensi kepada sekitar 1 juta lebih GTK, memberi tunjangan profesi kepada lebih dari 200 ribu guru non-PNS dan memberi tunjangan khusus bagi lebih dari 68 ribu guru di daerah perbatasan atau pedalaman. Pada tahun yang sama, unit utama ini juga akan mengirim 3.500 Guru Garis Depan.

Pada Direktorat Jenderal Kebudayaan, setidaknya ada 14 program prioritas yang ditetapkan. Selain akan merevitalisasi 24 museum, 158 desa adat, tujuh taman budaya, juga memfasilitasi 515 komunitas dan 68 rumah budaya. Ditjen Kebudayaan juga akan mengajak seniman masuk sekolah ke 20 lokasi di seluruh Indonesia dan meregistrasi 24 ribu lebih cagar budaya, mendaftarkan 4 ribu cagar budaya, serta menetapkan 30 cagar budaya.

Sementara di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, program prioritas yang dikerjakan selama 2016 di antaranya pengembangan bahasa Indonesia, perlindungan bahasa dan sastra, gerakan literasi bangsa, gerakan cinta sastra, dan penyiapan laboratorium kebhinekaan bahasa dan perpustakaan.

Unit utama lainnya, yaitu Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud juga ikut mendukung tiga strategi itu dengan kegiatan prioritas yang diprogramkan selama 2016 ini. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan mengatakan, sebagian besar anggaran yang diterima Kemendikbud harus diperuntukkan untuk sepenuhnya membiayai program-program rakyat. **(Ratih)**

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Mendapat anggaran senilai Rp 2,24 triliun, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat memfokuskan kegiatan prioritasnya pada tiga hal, yaitu penguatan pelaku, peningkatan mutu dan akses, dan pelibatan publik. Sejumlah target kinerja ditetapkan sebagai bagian dari pelaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

1. Penguatan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan

Beberapa Kegiatan Prioritas:



ditingkatkan kapasitas menerapkan pendidikan keluarga



kursus Mengikuti uji kompetensi



kursus mengikuti magang DUDI



melakukan pemberdayaan vokasi dan literasi



mitra PAUD diberi bantuan penguatan



Perempuan marginal diberikan PKH



LKP melakukan publikasi standarisasi program



Paud Dikmas ditingkatkan kompetensi

2. Peningkatan Mutu dan Akses

Beberapa Kegiatan Prioritas:



Lembaga PAUD diberi bantuan



peserta Keaksaraan Dasar diberi BOP



Siswa diberi BOP Paket A



Peserta KUM diberi BOP



Siswa diberi BOP Paket B



Peserta kursus diberi bantuan PKK



Siswa diberi BOP Paket C Vokasional



ribu peserta kursus diberi bantuan PKW

3. Pelibatan Publik



Anugerah Aksara, TBM, Unjuk Prestasi Dikmas



Sosialisasi Budaya Anti Korupsi



Apresiasi PAUD



Peningkatan Kualitas dan Kualifikasi Pengelola Keuangan



Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan Berprestasi Tingkat Nasional



Penguatan e-procurement, e-Office, e-MSA (Monitoring dan Serapan Anggaran)



Penguatan Pengawasan dan SPI (Satuan Pengawas Internal)



Layanan Pusat Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah



Isu Strategis

Pemenuhan hak terhadap pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berkualitas

Arah Kebijakan

Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan Pendidikan Dasar dan Menengah berkualitas

Setidaknya ada empat program prioritas yang dikerjakan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah selama 2016 ini. Program tersebut adalah Program Indonesia Pintar, Sekolah Garis Depan, Penumbuhan Budi Pekerti, dan Kurikulum. Dengan anggaran mencapai Rp 27,5 triliun, unit utama ini juga memiliki kebijakan dan strategi untuk penguatan dan peningkatan di bidang pendidikan dasar dan menengah.



Isu Strategis

Peningkatan pendidikan kewargaan

Arah Kebijakan

Mengembangkan pendidikan kewargaan di sekolah untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman sosial-budaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik (**good citizen**)



Isu Strategis

Peningkatan pendidikan karakter

Arah Kebijakan

1. Meningkatkan kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, watak, dan kepribadian peserta didik
2. Membangun budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar yang baik bagi siswa



Isu Strategis

Peningkatan kualitas pembelajaran

Arah Kebijakan

1. Memperkuat jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan
2. Mengembangkan kurikulum



Isu Strategis

Peningkatan tata kelola pendidikan

Arah Kebijakan

1. Meningkatkan tata kelola pendidikan dalam kerangka desentralisasi
2. Memperkenalkan model pendanaan dan penganggaran berbasis kinerja untuk bidang pendidikan di tingkat daerah
3. Memperkuat Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
4. Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas
5. Memperkuat sistem informasi pendidikan



Isu Strategis

Peningkatan efisiensi pembiayaan pendidikan

Arah Kebijakan

1. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan anggaran pendidikan
2. Memperkuat mekanisme pembiayaan pendidikan

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Unit utama yang mengurus guru dan tenaga kependidikan ini memiliki sejumlah program prioritas dengan target yang telah ditetapkan selama 2016 ini. Program-program tersebut di antaranya penyediaan guru garis depan, peningkatan kompetensi, peningkatan kinerja, pemberian tunjangan/insentif bagi guru non-PNS, serta peningkatan kualifikasi pendidikan.



3.015.315

GTK
Diuji Kompetensi

1.004.318

GTK
Diberikan pelatihan peningkatan kompetensi (PKB)

5.870

Kelompok Kerja
Diberi bantuan peningkatan kompetensi



637.964

GTK Madya/Utama
Ditingkatkan Karir/ Jabatan Fungsionalnya

207.596

Guru Non PNS
diberi Tunjangan Profesi

100.000

Guru Non-PNS
diberi Insentif Guru Bukan PNS



68.028

Guru
di daerah perbatasan/pedalaman/CLC diberi Tunjangan Khusus

86.295

Guru
Diberikan sertifikasi Guru

3.500

Guru
Dikirim ke Garis Depan (Daerah terpencil, Terluar)

Direktorat Jenderal Kebudayaan

Selama 2016 ini, Direktorat Jenderal Kebudayaan menetapkan 14 program prioritas yang mencakup mulai dari museum, cagar budaya, rumah budaya, desa adat, dan lainnya. Pada tahun ini, unit utama ini juga menyelenggarakan World Culture Forum (WCF) kedua yang direncanakan diselenggarakan pada Oktober 2016.

Program Prioritas

Target

Revitalisasi Museum	24 Museum
Pembangunan Museum	12 Museum
Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya	24.292 Cagar Budaya Diregistrasi, 4000 Cagar Budaya yang Didaftarkan, 30 Cagar budaya yang Ditetapkan
Revitalisasi Taman Budaya	7 Taman Budaya
Fasilitasi Sarana Kesenian di Satuan Pendidikan	500 sekolah dan 18 lab
Pengembangan Rumah Budaya Indonesia di Luar Negeri	10 Rumah Budaya
Revitalisasi Desa Adat	158 Desa Adat
Fasilitasi Komunitas Budaya	515 Komunitas
Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara	68 Rumah Budaya
Belajar Bersama Maestro	45 Pelajar
Seniman Masuk Sekolah	20 lokasi
Penyusunan Buku Tokoh Inspiratif	6 Buku
Anugerah Kebudayaan dan Maestro	100 peserta
Peserta Internalisasi Nilai Budaya	25.347 orang

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Badan yang memiliki tugas pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia ini memiliki kegiatan prioritas pada tiga pusat yang berada di bawahnya. Seperti program penambahan lema di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), program gerakan literasi bangsa, dan pengiriman 80 tenaga pengajar BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing) ke luar negeri.

Pusat Pengembangan dan Pelindungan

TARGET

124.991
384.686
91.200

14
5
360
9

PROGRAM PRIORITAS

Pengembangan bahasa

- penambahan Lema KBBI
- penambahan glosarium
- penyusunan kamus bidang ilmu

Pelindungan bahasa dan sastra melalui:

- Peta Vitalitas
- Revitalisasi bahasa berbasis komunitas,
- Konservasi
- fasilitasi pengembangan dan pelindungan

Pusat Pembinaan

PROGRAM PRIORITAS

TARGET

Gerakan Literasi Bangsa	34 Sekolah Dasar, 34 komunitas, 170 Bahan Ajar, 68 tenaga literasi
Gerakan Cinta Sastra	20 sastrawan, 20 komunitas sastra, 20 pembinaan sastra, 20 fasilitasi sastra, 20 upaya pemberdayaan komunitas
Penguatan Penggunaan Bahasa di Daerah Perbatasan	satu dokumen bahan ajar, 40 tenaga kebahasaan terlatih, 20 kelompok belajar, 800 pembelajar mahir baca tulis, dan 4 daerah perbatasan terbina.
Penguatan Penggunaan Bahasa Media Luar Ruang	memperkuat sinergi antara satker Pusat dan satker Balai/Kantor Bahasa

Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan

PROGRAM PRIORITAS

TARGET

1. Penyusunan Bahan Ajar Pengajaran BIPA	6 bahan
2. Penyusunan Bahan Ajar Bahasa Internasional Strategis	5 bahan
3. Pembelajaran Bahasa Internasional Strategis	400 orang
4. Pembelajaran BIPA	200 orang
5. Pengiriman Tenaga Pengajar BIPA di Luar Negeri	80 orang
6. Fasilitasi Institusi Penyelenggara BIPA	5 lembaga
7. Peningkatan kompetensi SDM ke luar negeri	5 orang
8. Penyiapan Laboratorium Kebinekaan Bahasa dan Perpustakaan	300 pengunjung

Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerima anggaran senilai **Rp 2,9 triliun** mengedepankan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Dengan anggaran tersebut, Sekretariat Jenderal menjalankan program-program berikut selama satu tahun ke depan.

- 01 — Peningkatan Layanan Prima dalam Pengadaan dan Penataan BMN Serta Sarana dan Prasarana Kementerian
- Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum dan Organisasi — 02
- 03 — Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara
- Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Akuntabilitas — 04
- 05 — Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Kerja Sama Luar Negeri
- Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian — 06
- 07 — Penyediaan Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan
- Peningkatan Layanan Prima di Bidang Informasi dan Kehumasan — 08
- 09 — Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan dan Kebudayaan
- Pengembangan Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (PTJJ) di Asia Tenggara — 10
- 11 — Peningkatan Sensor Film
- Pengembangan Perfilman Indonesia — 12
- 13 — Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
- Pengembangan dan Peningkatan Analisis Strategi Kebijakan — 14

Badan Penelitian dan Pengembangan

Unit eselon I ini memiliki lingkup tugas di lima bidang, yaitu kurikulum dan perbukuan; penilaian pendidikan; penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan; penelitian arkeologi; serta fasilitasi pelaksanaan akreditasi dan standar mutu pendidikan. Selama 2016 ini, Balitbang menyusun 13 program prioritas, di antaranya penyelenggaraan ujian nasional yang menasar lebih dari 7,5 juta siswa seluruh Indonesia.

- Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Perbaikan Dokumen Kurikulum
- Pengembangan Model Kurikulum dan Pembelajaran
- Perbaikan dan Penilaian Buku
- Penyelenggaraan Ujian Nasional
- Pengembangan Bank Soal
- Analisis Hasil Penilaian



Foto: Dok. BKLM



- Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan
- Penguatan Jaringan Penelitian
- Pengembangan Wahana Penyebaran Praktek Baik
- Penelitian Arkeologi
- Pengembangan “Rumah Peradaban” sebagai media interaksi
- Fasilitasi Pelaksanaan Akreditasi dan Standar Mutu
- Tata Kelola dan Layanan Perkantoran



1. Pasola

Kategori: Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan
Asal Provinsi: NTT

Pasola adalah permainan ketangkasan saling melempar lembing kayu dari atas kuda yang merupakan bagian dari upacara ritual Marapu. Pasola diselenggarakan oleh orang Sumba bagian barat untuk merayakan musim tanam padi. Pasola merupakan bentuk ritual untuk menghormati Marapu, mohon pengampunan, kemakmuran dan untuk hasil panen yang melimpah.

2. Pacu Jalur

Kategori: Tradisi dan Ekspresi Lisan
Asal Provinsi: Riau

Pacu Jalur adalah sejenis lomba dayung tradisional khas daerah Kuantan Singingi (Kuansing) yang hingga sekarang masih ada dan berkembang di Propinsi Riau. Lomba dayung ini menggunakan perahu yang terbuat dari kayu gelondongan yang oleh masyarakat sekitar juga sering disebut jalur. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, Pacu Jalur merupakan puncak dari seluruh kegiatan, segala upaya, dan segala keringat yang mereka keluarkan untuk mencari penghidupan selama setahun.

Mengenal Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sejak 2013 silam melakukan pencatatan dan penetapan terhadap warisan budaya Indonesia. Pencatatan dan penetapan ini dilakukan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan beragam kebudayaan di Indonesia. Setiap tahun Kemendikbud melakukan pencatatan pada minimal 10 ribu cagar budaya dan 2.000 warisan budaya tak benda.

Hingga saat ini, Kemendikbud telah menetapkan sebanyak 294 warisan budaya takbenda Indonesia. Penetapan itu dilakukan sejak 2013 hingga 2015. Pada sidang penetapan September 2015 dari 339 karya budaya yang diusulkan dari 34 provinsi di Indonesia, ditetapkan 121 warisan budaya takbenda Indonesia. Berikut 10 di antaranya.

25

Foto: Direktorat Jenderal Kebudayaan

3. Singo Ulung

Kategori: Seni Pertunjukan
Asal Provinsi: Jawa Timur

Singo ulung adalah tarian rakyat dari Kabupaten Bondowoso. Dalam legendanya, Singo Ulung merupakan gelar yang diberikan kepada seseorang yang bernama Juk Seng, bangsawan dari Blambangan yang suka mengembara.

4. Musik Bia

Kategori: Seni Pertunjukan
Asal Provinsi: Sulawesi Utara

Awalnya, Bia atau kerang (dalam ukuran cukup besar dapat dipegang dengan kedua tangan manusia) digunakan manusia sebagai alat komunikasi yang digemakan (dibunyikan dengan cara meniup bia tersebut) dari suatu tempat tinggi di pesisir pantai (bukit atau di atas pohon kelapa). Orang Minahasa menyebutnya Pontuang. Di wilayah pedalaman Minahasa, pontuang digunakan oleh kelompok mapalus, yang dibunyikan pada pagi dan sore hari.

5. Obor Pattimura

Kategori: Adat Istiadat Masyarakat,
Ritus, dan Perayaan
Asal Provinsi: Maluku

Setiap tanggal 14 Mei dilakukan proses pembakaran obor Pattimura di gunung Saniri, dan obor tersebut hanya bisa dibakar oleh anak adat Negeri Tuhaha. Upacara ini merekonstruksi bagaimana seorang kapitan Pattimura yang sebelum melakukan perlawanan dengan pihak Belanda, kemudian melakukan upacara adat untuk meminta restu dari Tuhan dan para Leluhur di dalam menyatukan hati dan menggelorakan keberanian dan semangat pantang mundur di dalam menentang penjajah.

6. Upacara Adat Nujuh Jerami

Kategori: Adat Istiadat
Masyarakat, Ritus, dan Perayaan
Asal Provinsi: Bangka Belitung

Upacara Nujuh Jerami merupakan ritual yang diselenggarakan setiap tahun berdasarkan penanggalan Cina, yaitu pada 13 hari bulan yang bertepatan dengan bulan purnama. Dalam penanggalan masehi, biasanya jatuh pada setiap bulan April. Upacara ini dirayakan oleh komunitas Orang Lom di Dusun Air Abik dan Dusun Pejam. Ritual ini diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur warga adat.



Foto: Direktorat Jenderal Kebudayaan

7. Sapundu

Kategori: Kemahiran dan
Kerajinan Tradisional
Asal Provinsi: Kalimantan Tengah

Sapundu merupakan salah satu bentuk seni ukir tradisional masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, berupa patung-patung dengan motif dan fungsi yang khas. Umumnya motif ukiran sapundu menggambarkan tentang manusia. Media ukirnya menggunakan kayu ulin, atau dalam bahasa Dayak kayu disebut juga kayu tabalian. Masyarakat Dayak Ngaju menganggap, kayu ulin memiliki kekuatan yang luar biasa. Sapundu merupakan alat kelengkapan dari upacara Tiwah.

8. Polopalo

Kategori: Tradisi dan Ekspresi Lisan
Asal Provinsi: Gorontalo

Polopalo berasal dari kata polo-polopalo artinya bergetar nyaring. Polopalo adalah permainan rakyat yang menggunakan alat terbuat dari seruas bamboo/bulu kering atau juga dari kayu kering dan berbunyi nyaring. Fungsinya pada masa dahulu digunakan oleh para petani sebagai penghibur di saat menjaga padi dan jagung. Kemudian fungsinya meluas sebagai tanda waktu berbuka puasa dan makan sahur di bulan Ramadhan.



9. Koteka

Kategori: Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
Asal Provinsi: Papua

Busana kaum laki-laki Mee dan Dani. Koteka terbuat dari jenis tanaman berupa buah labu Cina yang ditanam di daerah mereka. Tanaman merambat ini diambil buahnya yang sudah tua. Buah labu yang sudah kering dilubangi pada bagian bawahnya dan dipasang tali sebagai pengait koteka, dan pada bagian atasnya diberi lubang untuk tali pengikat atau menggantungkan aksesoris.

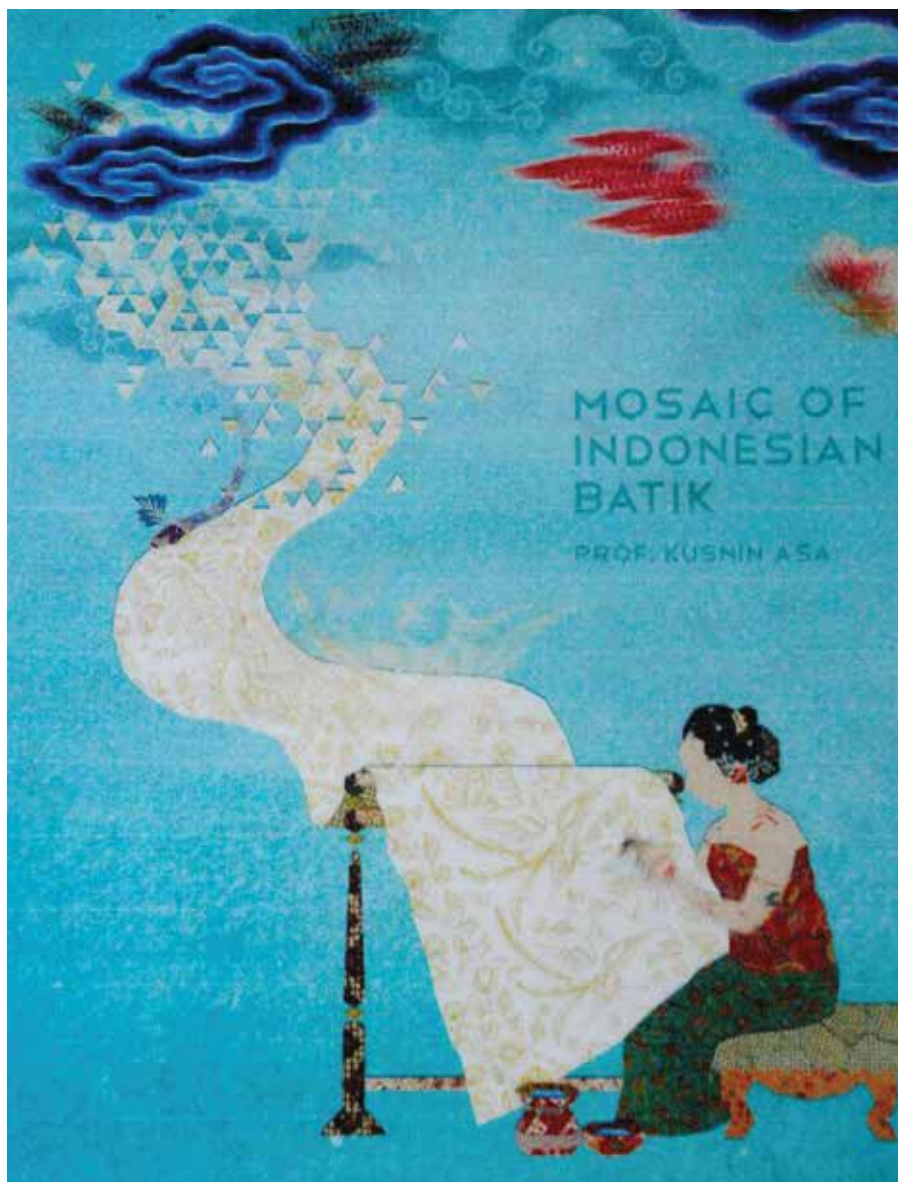
10. Ulu Ambek

Kategori: Seni Pertunjukan
Asal Provinsi: Sumatera Barat

Pertunjukan ulu ambek adalah pertunjukan beradat, pertunjukan kesenian yang diklaim sebagai suntiang (mahkota) ninik mamak atau penghulu. Oleh karena itu selama pertunjukan berlangsung tidak boleh ada pertunjukan lain pada saat yang sama. Selama pertunjukan berlangsung tidak dibolehkan seseorang menimbulkan kebisingan. Ada tiga citra visual yang menarik pada pertunjukan ulu ambek, yaitu bersalaman, bertarung, dan kepemimpinan janang.

Resensi Buku

Mosaic of Indonesian Batik



Pengarang:

Kusnin Asa

Penerbit:Red & White
Publishing**Tahun Terbit:** 2014**ISBN:**

9789791008815

Jumlah Halaman:

216

Sampul:

Soft Cover

Batik (/ba•tik/ n) merupakan kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam pada kain (KBBI, 2012).

Batik merupakan salah satu kekayaan budaya dari Indonesia yang ditetapkan sebagai warisan budaya non-benda (intangible cultural heritage) oleh UNESCO pada tahun 2009. Ragam hias batik Indonesia terpengaruh oleh asimilasi ras dan akulturasi budaya berbagai rumpun

bangsa yang pernah tinggal di Indonesia.

Seni batik, sesuai sejarah pertumbuhannya, awalnya memiliki fungsi sebagai salah satu sarana ritual dan bentuk pelestarian budaya masyarakat. Pada masa ini, corak batik memiliki nilai seni

dan filosofi yang merupakan ikon budaya lingkungannya. Pada abad ke 19, batik tumbuh menjadi komoditas ekonomi dan berkembang ke daerah pesisir pantai di Jawa. Berbagai corak dan ragam hias batik bermunculan dari pelaku industri batik, hingga saat ini batik berkembang

menjadi tidak hanya sekedar kain, melainkan dapat digunakan dalam bentuk kemeja dan gaun yang dapat digunakan sehari-hari.

Dalam buku *Mosaic of Indonesian Batik* ini, Prof. Kusnin Asa memberikan gambaran umum perkembangan batik di Indonesia, mulai dari munculnya seni hias pra-sejarah di dinding gua, masuknya seniman pemahat dari India, pencampuran budaya Yunani dan Cina pada seni lukis di Indonesia, hingga munculnya nama 'batik' pada abad ke 10-14 M dari Bahasa Sunda Kuno yang dibawa Kerajaan Galuh dan Pakuan-Padjajaran.

Di dalam bukunya, arkeolog pada Universitas Diponegoro Semarang ini menampilkan foto aneka corak batik nusantara. Mulai dari batik Yogyakarta berwarna coklat yang gagah, rumit dan indahya corak batik Banyumas, cerianya corak batik Jakarta, dan kayanya keragaman corak batik Cirebon.

Sejarah dan kekhasan batik di masing-masing daerah tersebut diceritakan penulis dalam 13 bab yang mampu mengedukasi pembacanya untuk mengenal kekayaan batik nusantara. Walau menceritakan banyak sejarah, buku ini tidak terasa membosankan karena diselingi indahya gambar batik pada setiap bab.

Jangan mengaku orang Indonesia jika belum mengenal batik!

PERPUSTAKAAN KEMENDIKBUD

Membaca bisa menjadi kegiatan yang sangat menyenangkan, terutama bila dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang mendukung kenyamanan. Perpustakaan Kemendikbud menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut agar pengunjung betah berlama-lama membaca berbagai buku koleksi yang ada di dalamnya.



27.150 Buku



Katalog Online



6.501 Audiovisual
(CD, DVD, VHS, BluRay)



36 Terbitan Berkala
(Koran, Majalah, Jurnal)



1.279 kartu perpustakaan
baru yang diterbitkan



2,8 Juta Pemustaka



Aplikasi PlayStore SLIMS



Fasilitas Internet
dan Hotspot (Wi-Fi)



Ruang Audiovisual



Ruang Baca Buku



Cafe

<http://perpustakaan.kemdikbud.go.id>

Penumbuhan Budaya Baca di Sekolah

Oleh: Lukman Solihin, Herman Hendrik, Indah Pratiwi, Kaisar Julizar, Noviyanti

Setelah berhasil mengentaskan masalah niraksara dengan indeks mencapai 99,1% (UNESCO, 2012), Indonesia masih dibelit permasalahan rendahnya budaya baca. Tampaknya kemampuan baca-tulis tidak berbanding lurus dengan minat baca masyarakat.

Hasil survei UNESCO tentang minat baca masyarakat Indonesia tahun 2012 memperlihatkan angka 0,001, yang berarti dari 1.000 orang hanya satu orang yang memiliki minat baca tinggi (Kompas, 28/08/2015). Lebih jauh, laporan PIRLS pada tahun 2011 mengenai rata-rata indeks budaya baca menunjukkan, dengan skala 0-1000, Indonesia berada di level budaya baca rendah, yaitu di posisi 428 (Mullis et al., 2011). Khusus untuk pelajar, data dari PISA pada tahun 2012 menunjukkan, skor kemampuan membaca pelajar Indonesia adalah 396, menempatkan Indonesia di posisi 64 dalam urutan negara-negara OECD (www.theguardian.com).

Kenyataan muram ini boleh jadi tidak sepenuhnya benar, sebab sudah ada berbagai upaya baik oleh masyarakat, sekolah, dan pemerintah dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Meskipun semula nampak sporadis, lambat laun gerakan ini kian merata. Merespons gejala dan

upaya yang telah dilakukan itu, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjak Dikbud), Balitbang Kemendikbud, melakukan penelitian mengenai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan sekolah dalam meningkatkan budaya.

Penelitian dilakukan kepada Sekolah Dasar Negeri (SDN) di 13 kota dan kabupaten, antara lain SDN 26 Rimbo Kaluang, Kota Padang; SDN 07 VII Koto Sungai Sariak, Padang Pariaman; SDN 2 Rajamandala Kulon, Kabupaten Bandung Barat; SDN 01 Kandri, Gunung Pati, Kota Semarang; SDN 01 Garung, Kabupaten Wonosobo; SDN Golo, Kota Yogyakarta; SDN 1 Pundong, Kabupaten Bantul; SDN Bubutan IV, Kota Surabaya; SDN Mojokarang, Kabupaten Mojokerto; SDN Kompleks IKIP, Makassar; SDN 5 Ballo, Kabupaten Takalar; SDN Oam, Kabupaten Kupang; dan SDN Naikoten Bertingkat, Kota Kupang. Pemilihan sekolah dilakukan dengan pertimbangan sekolah tersebut diyakini telah menerapkan program budaya baca di sekolah.

Upaya Pemerintah

Budaya baca sebetulnya telah menjadi perhatian pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, meskipun belum merata. Beberapa produk hukum yang berkaitan dengan pendidikan dan perpustakaan dapat menjadi bukti perhatian



tersebut. Secara umum, berbagai kebijakan pemerintah terkait dengan penumbuhan budaya baca dapat dipilah menjadi kebijakan penumbuhan budaya baca melalui (1) perpustakaan (UU Perpustakaan) dan (2) penumbuhan budaya baca melalui sekolah (UU Sisdiknas dan peraturan turunannya).

UU tentang Perpustakaan mengatur kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam menggalakkan promosi

Permendiknas tentang Standar Proses misalnya, menyatakan bahwa proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai

mengikuti pelatihan atau sertifikasi. Melengkapi berbagai kebijakan di atas, Permendikbud mengenai Budi Pekerti juga mengatur upaya penumbuhan budi pekerti melalui kegiatan membaca selama 15 menit sebelum



Foto: Dok. BKLM

31

gemar membaca dan mewujudkan perpustakaan dengan standar nasional. UU tentang Sistem Pendidikan Nasional secara eksplisit menyebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Lebih jauh, turunan kebijakan mengenai pendidikan mendudukkan sekolah sebagai kanal penting dalam membentuk budaya baca.

bentuk tulisan. Untuk itu, perpustakaan merupakan sarana kunci dalam mendukung tujuan tersebut. Permendiknas tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah telah mengatur perihal kepala perpustakaan dan petugas perpustakaan sekolah, yang mana setiap sekolah wajib memiliki petugas perpustakaan dengan kualifikasi pendidikan minimal SMA atau sederajat dan memiliki kompetensi dengan

pembelajaran. Sementara dari segi pendanaan untuk menambah koleksi bacaan, sekolah dapat menggunakan Biaya Operasional Sekolah (BOS) sebesar 5%.

Berbagai regulasi di atas cukup memadai untuk mendorong upaya penumbuhan budaya baca. Namun kenyataannya terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut.

Kementerian Pendidikan dan dinas pendidikan di daerah belum mampu mewujudkan satu sekolah satu perpustakaan dengan standar nasional, sehingga upaya penumbuhan budaya baca di sekolah terkendala oleh terbatasnya sarana. Begitu pula standar mengenai pengelola perpustakaan belum optimal dilaksanakan. Selain itu, dana BOS sebesar 5% dirasa belum mencukupi kebutuhan pengembangan perpustakaan.

Kurangnya implementasi kebijakan di tingkat pusat berimbas di tingkat daerah, di mana pemerintah daerah umumnya belum memiliki

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan serta Peraturan Walikota Surabaya tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan; (2) Sinergi antara Badan Arsip dan Perpustakaan dengan Dinas Pendidikan melalui nota kesepahaman, di mana sarana perpustakaan dan kurikulum wajib baca diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, sementara dukungan koleksi perpustakaan dan tenaga perpustakaan diupayakan oleh Barpusda; (3) SDM pengelola perpustakaan sekolah dan taman bacaan direkrut dan dilatih oleh Barpusda, sehingga mampu mengelola

Corporate Social Responsibility (CSR) serta melibatkan perguruan tinggi melalui program CSR.

Program Budaya Baca di Sekolah

Sekolah dasar yang diteliti secara umum telah berupaya mengembangkan program penumbuhan budaya baca di sekolah. Setidaknya ada tiga aspek dalam upaya penumbuhan budaya baca di sekolah, yaitu (1) sarana berupa perpustakaan atau sarana lain yang dilengkapi dengan koleksi bacaan; (2) strategi penumbuhan budaya baca melalui berbagai kebijakan dan program; (3) serta kerja sama dan pelibatan berbagai pihak.



Sarana dan prasarana yang disediakan oleh sekolah-sekolah tersebut biasanya adalah perpustakaan atau ruang lain yang difungsikan seperti perpustakaan. Selain itu, ada improvisasi berupa penyediaan buku di tempat-tempat yang bukan berfungsi sebagai perpustakaan, yang tujuannya adalah mendekatkan buku kepada siswa, misalnya pojok baca (di dalam kelas), pohon baca, gerai baca, gerobak baca, dan kotak baca.

kebijakan khusus dalam menumbuhkan budaya baca. Satu dari sedikit pemerintah daerah yang memiliki kebijakan khusus di bidang budaya baca adalah Kota Surabaya yang mencanangkan diri sebagai Kota Literasi sejak 2 Mei 2014.

Setidaknya terdapat 5 aspek yang diusahakan oleh Pemkot Surabaya, yaitu (1) aspek regulasi dengan menerbitkan

perpustakaan secara maksimal; (4) program penumbuhan budaya baca melalui kampanye gemar membaca, berbagai perlombaan, dan program Tantangan Membaca kepada siswa. Siswa memiliki jurnal catatan membaca, sehingga mudah dipantau oleh guru dan pengelola perpustakaan; (5) pelibatan ekosistem pendidikan dengan mengajak perusahaan melalui program

Sekolah-sekolah itu juga telah merancang dan melaksanakan program-program yang tujuannya adalah untuk menumbuhkan budaya baca. Program-program yang paling populer adalah jadwal kunjungan wajib ke perpustakaan, kegiatan "membaca senyap" selama 10 sampai 15 menit

PENUMBUHAN BUDAYA BACA DI SEKOLAH

INTERNAL SEKOLAH

Sarana

- Perpustakaan/ruang baca nyaman
- Mendekatkan bacaan kepada siswa (sudut baca)
- Penambahan koleksi buku 5–10 % dari BOS
- Kerja sama peminjaman buku ke Perpustakaan
- Sumbangan buku, bantuan paguyuban, komite,

CSR/NGO

- Guru yang tersertifikasi menyumbangkan buku setiap bulan

Strategi

- Wajib baca (15 menit sebelum pelajaran)
- Wajib kunjungan ke perpustakaan
- Program perpustakaan yang menarik
- Kegiatan pasca membaca
 1. Menceritakan isi bacaan di depan kelas
 2. Membuat mading dan majalah
 3. Review bacaan dan penilaian dari guru
- Penghargaan
 1. Pin penghargaan rajin membaca
 2. Duta literasi/duta membaca
 3. Taruna literasi/pustakawan cilik
 4. Hadiah membeli buku

EKSTERNAL SEKOLAH

Pemerintah dan Pemerintah Daerah

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Pelaksanaan UU Nomor 43 tentang Pengelolaan Perpustakaan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
- Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota/Bupati
- Alokasi anggaran (DAK) untuk Perpustakaan dan Penambahan Koleksi Buku
- Melalui dinas pendidikan dan perpustakaan mendampingi dan mengawasi upaya penumbuhan budaya baca

Paguyuban Orang Tua, Komite, dan LSM

- Bersama pengelola sekolah menyusun RABS
- Menjadi relawan literasi
- Menggalang bantuan buku
- Mengadakan pelatihan dan pendampingan literasi

sebelum pelajaran, pemberian penghargaan kepada siswa yang berpartisipasi dalam upaya penumbuhan budaya baca, penyelenggaraan lomba-lomba terkait literasi, pembangunan ruang perpustakaan yang dibuat nyaman dan semenarik mungkin, dan program jurnal membaca serta big book untuk siswa yang belum lancar membaca.

Dalam upaya menumbuhkan budaya baca, sekolah-sekolah tersebut juga bekerja sama dengan berbagai pihak, di antaranya lembaga donor (seperti USAID dan Save the Children), perusahaan swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, komite sekolah dan paguyuban orang tua siswa, lembaga pemerintah (Dinas Pendidikan

Dan Perpustakaan), perguruan tinggi, dan penerbit buku.

Dari ketiga aspek di atas, nampak bahwa budaya baca mulai tumbuh di sekolah. Catatan kunjungan ke perpustakaan dan peminjaman buku oleh siswa rata-rata meningkat. Guru juga merasa terbantu karena siswa yang gemar membaca umumnya lebih mudah menangkap pelajaran dengan baik.

Kendati demikian, upaya tersebut masih menemui berbagai kendala. Seperti telah disebutkan, kendala utama terutama pelaksanaan dan pengawasan kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah belum berjalan baik, sehingga berdampak langsung kepada sekolah. Tidak semua

sekolah yang menerapkan program budaya baca memiliki perpustakaan yang memadai, jumlah koleksi buku yang cukup, serta tenaga perpustakaan yang terlatih.

Temuan penelitian ini memperlihatkan, program budaya baca yang diinisiasi oleh sekolah tidak dapat berjalan maksimal tanpa dukungan berbagai pihak. Keberlanjutan dari program budaya baca tersebut terancam karena kendala sarana dan keterediaan buku. Selain itu, peran pemerintah daerah yang terorganisir baik, seperti dilakukan oleh Pemkot Surabaya, dapat memberikan dampak yang luas, karena seluruh sekolah berpartisipasi dalam program tersebut.

Senarai Kata Serapan

Abnus

Bentuk Asal: abnūs
Asal Bahasa: Arab
Arti: kayu arang

Bilyet

Asal Kata: biljet
Asal Bahasa: Belanda
Arti: 1 kartu; karcis; 2 kertas berharga spt yg dikeluarkan oleh bank

Langkan

Bentuk Asal: lânkan
Asal Bahasa: Cina
Arti: serambi atas tempat meninjau; anjung perangan; balkon

Halsduk

Bentuk Asal: halsdoek
Asal Bahasa: Belanda
Arti: selendang penutup leher

Kuntau

Bentuk Asal: kûn thâu
Asal Bahasa: Cina
Arti: pencak cara Cina

Arkais

Bentuk Asal: archaic
Asal Bahasa: Inggris
Arti: 1 berhubungan dengan masa dahulu atau berciri kuno, tua; 2 tidak lazim dipakai lagi; ketinggalan zaman

Angsana

Bentuk Asal: asana
Asal Bahasa: Sansakerta/Jawa Kuno
Arti: pohon yg bunganya berwarna kuning dan berbau jeruk, kulitnya dapat dimanfaatkan untuk obat, kayunya digunakan untuk pembuatan alat-alat rumah tangga, bahan bangunan, kerajinan tangan, *Pterocarpus indica*

Ekulibrium

Bentuk Asal: equilibrium
Asal Bahasa: Inggris
Arti: keadaan mantap karena kekuatan-kekuatan yang berlawanan, setimbang, atau sepadan; kesetimbangan

Andrawina

Bentuk Asal: andrawina
Asal Bahasa: Sansakerta/Jawa Kuno
Arti: perjamuan resmi

Astakona

Bentuk Asal: astakona
Asal Bahasa: Sansakerta/Jawa Kuno
Arti: segi delapan

Beluam

Asal Bahasa: Melayu
Arti: kantong (tas) kecil dari kain

Mizan

Bentuk Asal: mizân
Asal Bahasa: Arab
Arti: 1 neraca; timbangan; 2 Libra; Tula

Çeñcawan

Asal Bahasa: Melayu
Arti: tempurung lutut

Daftar Kontak

Pelibatan publik dalam hal pengawasan anggaran diperlukan agar prinsip transparansi dan akuntabilitas terjaga. Bila memiliki pertanyaan seputar anggaran fungsi pendidikan yang dikelola di 3 kementerian (Kemendikbud, Kemenristekdikti, dan Kemenag), masyarakat dapat menghubungi nomor-nomor berikut.

Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Anggaran

- Telepon: 021-3866117
- Faksimili: 021-3505118
- Email : ppid_dja@kemenkeu.go.id

Dewan Pertimbangan Rakyat (DPR)
Badan Anggaran

- Telepon: 021-5715775, 021-5715776
- Faksimili: 021-5715772
- Email : p_anggaran@dpr.go.id

Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi

- Telepon: 021-3169687, 021-3169682
- Email: humas@ristek.go.id

Kementerian Agama
Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat

- Telepon: 021-3811679, 021-34833004
- Email: pinmas@kemenag.go.id

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
BOS

- Alamat web : <http://bos.kemdikbud.go.id>
- Nomor telepon : 0-800-140-1299 dan 0-800-140-1276 (bebas pulsa) 021-5725980 dan 021-5725632
- Faksimili: 021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
- Email : bos@kemdiknas.go.id

Program Indonesia Pintar (PIP)

- Alamat web: <http://pengaduanpipkemdikbud.go.id>
- SMS: 0857-7529-5050 dengan format: KIP#Prov#Kab/Kota#Kec#NamaSekolah#IsiPesan

Unit Layanan Terpadu

- Alamat web: <http://ult.kemdikbud.go.id>
- Telepon: 021-5703303/5711144 pesawat 2115, 021-57903020
- Faksimili: 021-5733125
- SMS: 0811976929
- Email: pengaduan@kemdikbud.go.id

Selamat

Atas Ditetapkannya
9 Tari Bali sebagai
Warisan Budaya Dunia Takbenda
UNESCO



Berdasarkan Sidang UNESCO di Namibia, Afrika Selatan
2 Desember 2015